

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi Angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan (Sinollah, 2019:32).

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kelanjutan dari program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP). Khusus untuk PNPM Mandiri perkotaan sebagai salah satu program nasional yang sasaran utamanya adalah masyarakat miskin perkotaan untuk dimandirikan dan disejahterahkan, maka PNPM Mandiri perkotaan diberlakukan untuk wilayah-wilayah perkotaan yang dianggap memiliki masyarakat

miskin. PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal adalah untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik (Wongkar et al., 2015:2-3).

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan ialah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan (Mahendra, 2017:2).

Masyarakat yang terbagi dalam tiga kategori sosial yakni masyarakat menengah atas yakni ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum, berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga. Masyarakat menengah yakni ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam komunitas kegiatan. Masyarakat menengah bawah biasanya masyarakat ini terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha

memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan penerima dana kesejahteraan dari pemerintah (Triwijayati & Deviga, 2018:143-144).

Berdasarkan kategori tersebut pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan yang akan diambil masing-masing kategori. Masyarakat yang menengah bawah dan kurang mampu secara keuangan perlu diberi bantuan dana dari pemerintah agar dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Namun belum ada kebijakan maksimal yang diberikan oleh pemerintah untuk masing-masing kategori tersebut (Jenawi, 2016:209).

PNPM-Mandiri Pedesaan Merupakan program pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin dalam memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik serta mengontrol keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingannya baik dalam hal menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah maupun kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Melalui PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan adanya perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat miskin serta mampu untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat (Ding, 2014:2889).

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang kompleks, berdimensi majemuk, dan tidak mudah untuk dijabarkan dengan sebuah penjelasan definitif. Lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk hal ini seperti Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan hidup tertentu.

Sementara itu, ekonom-humanis seperti Amartya Sen (1999) lebih setuju dengan pandangan bahwa kemiskinan adalah bentuk absennya kemerdekaan (*lack of freedom*) dan kapabilitas (*capabilities*) atas diri seseorang yang menyebabkan ia tidak mampu mendapatkan apa yang menjadi hak dasarnya sekaligus menjalankan fungsi-fungsi utamanya (*functioning*) sebagai individu. Di pihak lain, Oscar Lewis (1959) seorang antropolog Amerika secara lebih tajam bahkan mengajukan teori kontroversial yang menjelaskan kemiskinan sebagai suatu bentuk budaya (*the culture of poverty*).² Sementara itu, ilmuwan Indonesia seperti Soetandyo Wignjosebroto seperti dikutip oleh Suyanto (1995) mengajukan teori kemiskinan struktural di mana kemiskinan dipahami sebagai konsekuensi logis dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan (Marbun, 2009)

Kemiskinan di Negara sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relatif semakin meningkat terutama di wilayah perdesaan. Tingkat kemiskinan diperdesaan sangat lah tinggi berbeda dengan daerah perkotaan, masyarakat di daerah perdesaan relatif jenjang pendidikannya tamatan SMA sehingga menyusahakan mereka untuk mencari pekerjaan yang tetap berbeda dengan daerah di perkotaan masyarakatnya sudah pasti memiliki

pekerjaan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri (Sahlan & Ubaidullah, 2019:3-4).

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Kemiskinan adalah salah satu hal masalah yang perlu ditangani secara serius. Karena dasar permasalahan kemiskinan yaitu kurang terpenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, kebutuhan dasar bersifat dinamis dari suatu periode ke periode yang lain, semakin maju suatu negara, kebutuhannya dasar manusianya akan meningkat. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan timbul karena ada sebagian daerah yang belum sepenuhnya ditangani, ada sebagian sektor yang harus menampung tenaga kerja secara berlebih dengan tingkat produktivitas yang rendah, dan ada pula sebagian masyarakat yang belum ikut serta dalam proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasilnya secara memadai (Sumodinigrat, 1998:26) (Mardiyanto et al., 2021:874).

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah sangat berperan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Perlu adanya kegiatan pembangunan di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu pengetasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk

memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan (Purnamasari, 2015:16-17).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan kegiatan Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian pemodal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja (Jannah, 2021).

Program DAPM ini yakni memberdayakan masyarakat perempuan dengan nama program yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dimana program ini merupakan salah satu program yang ada di PNPM. Program dari PNPM dulunya meliputi seperti, program ekonomi produktif (UEP), pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Setelah PNPM diganti nama menjadi DAPM maka program yang ada pada DAPM di Kecamatan Poleang Selatan Desa Waemputang ini hanya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program Ekonomi Produktif (UEP).

Desa Waemputang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dengan jumlah

penduduk 2008 jiwa, 567 KK, dan sebanyak 1012 orang dikategorikan tidak mampu/miskin, dan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebagian dari masyarakat desa Waemputtang atau lebih tepatnya Ibu rumah tangga yang menganggur dan mempunyai kemampuan berbisnis memilih untuk meminjam modal di DAPM ini dan membuka usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian keluarganya. Mata pencarian masyarakat Desa Waemputang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana mayoritas Nelayan dan Petani. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan maka desa waemputang mengambil alternatif yaitu memberdayakan perempuan dengan ikut berpartisipasi dalam program kelompok Simpan Pinjam untuk perempuan (SPP). Dengan program tersebut, DAPM memberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat untuk membuka usaha. Pemberian bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan meringankan beban keluarga masing-masing yang pada akhirnya dapat menekan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Waemputang.

Untuk Desa Waemputtang sendiri yang menggunakan pinjaman modal usaha DAPM berjumlah 180 orang yang terdiri dari 36 kelompok, dimana setiap kelompok berjumlah 5 orang.

Pinjaman modal usaha dari DAPM yang salah satu produknya simpan pinjam perempuan adalah kegiatan penyediaan modal untuk membuka, mengembangkan dan meningkatkan usaha dengan harapan masyarakat miskin bisa memanfaatkan pinjaman tersebut sehingga masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang sekarang menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja ditingkat perdesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan program lanjutan untuk mengelola aset berupa dana bergulir di masyarakat sebagai warisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan (Mardiyanto et al., 2021:874).

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai latar penelitian) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti melalui pengetahuan dan kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti hanya memusatkan pada Peran Pinjaman Modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Waemputang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran dana amanah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Waemputang?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat Desa Waemputang dengan adanya pembiayaan dana amanah pemberdayaan masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran dana amanah pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Untuk mengetahui pendapatan masyarakat setelah melakukan pembiayaan di DAPM

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan yang terkait dengan pelaksanaan sistem tata kelola dana PNPM-MP.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem Tata Kelola dana PNPM-MP. Sselain itu

bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang bagaimana system penyaluran modal usaha Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa Waemputang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

1.6. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian proposal yang berjudul “Peran Pinjaman Modal Dana Aamanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul proposal ini, di antaranya:

1. Pinjaman Modal

Pinjaman modal yaitu salah satu dana yang dipinjam untuk keperluan usaha. Pinjaman modal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu program simpan pinjam perempuan dimana program ini dapat membantu para perempuan untuk meningkatkan pendapatan dan membantu perekonomian keluarga. Pinjaman modal simpan pinjam perempuan yang ada di Desa Waemputang ini banyak diminati oleh masyarakat karena adanya pinjaman modal ini dapat mengurangi pengangguran khususnya bagi Ibu rumah tangga dan dengan

adanya pinjaman modal simpan pinjam perempuan dapat membantu perekonomian masyarakat.

2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah dana milik masyarakat yang berasal dari dana bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan/atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan ialah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapatan hasil usaha masyarakat yang diperoleh dari pinjaman modal program simpan pinjam perempuan yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya pendapatan masyarakat Desa Waemputtang masih tergolong rendah dan setelah melakukan pinjaman modal di DAPM ini pendapatan masyarakat mengalami peningkatan karena Ibu rumah tangga yang mengganguur memilih membuka usaha dengan bantuan dana DAPM untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam hasil penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yang menampakkan karakteristik yang berbeda tetapi tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama membahas pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, diantaranya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka, didalamnya berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta landasan teori yang menguraikan teori-teori pendukung penelitian.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.